

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai negara didunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Pembangunan ekonomi disini yaitu bukan hanya terkait perkembangan pendapatan nasional riil saja, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, seperti perombakan sector pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembagian pendapatan.² Upaya pembangunan ekonomi ini dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakatnya. Namun masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut termasuk diantaranya yaitu pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian dan masih dihadapi oleh berbagai negara yang ada di dunia. Kemiskinan merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu negara atau daerah. Semakin banyak penduduk miskin yang terdapat pada suatu wilayah, cenderung menunjukkan bahwa semakin tidak sejahtera penduduk pada wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya semakin sedikit

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 423

persentase dan jumlah penduduk miskin suatu wilayah, mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut.³

Secara sederhana kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu yang ditandai dengan suatu tingkat kekurangan materi pada sebagian orang yang jika dibandingkan dengan standar hidup orang lain yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional sehingga dapat menghambat laju pembangunan ekonomi suatu negara maupun daerah.⁴

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik, presentase penduduk miskin di Indonesia pada periode September 2021 mulai menunjukkan penurunan sebesar 0,48% jika dibandingkan oleh periode sama pada tahun sebelumnya. Pada periode September 2020 tercatat terdapat masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 10,19% dengan jumlah 27.549,69 ribu jiwa. Sedangkan untuk periode September 2021 tercatat terdapat masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 9,71% dengan jumlah 26.503,65 ribu jiwa.⁵ Walaupun menjadi angin segar setelah terjadi peningkatan kemiskinan selama dua tahun ini, jumlah ini masih tergolong cukup tinggi dibandingkan kemiskinan yang terjadi pada tahun 2019.

Kemiskinan merupakan problematika yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak factor baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut

³ Teddy Christian Leasiwal, *Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku*, Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi, Vol. VII, No. 2, 2013, hlm. 196-303

⁴ Pantjar Simatupang dan Dermoredjo, *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan*, LPEM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. 51, 2003

⁵ Statistik Indonesia 2022, hlm. 272

Syamrilaode dalam Yanthi⁶ menyatakan terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu Rendahnya produktivitas tenaga kerja, Tingkat upah rendah, Disparitas pendapatan, Kurangnya kesempatan kerja, Rendahnya kualitas sumber daya alam, Kurangnya penggunaan teknologi, Etos dan motivasi kerja yang rendah, Kultur budaya, dan Pembangunan ekonomi/pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sharp, et.al dalam Kuncoro mengidentifikasi beberapa penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama jika dilihat secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Dimana penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas yang rendah pula sehingga pada gilirannya upah yang didapat juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini dapat disebabkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Dan yang ketiga yaitu kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.⁷

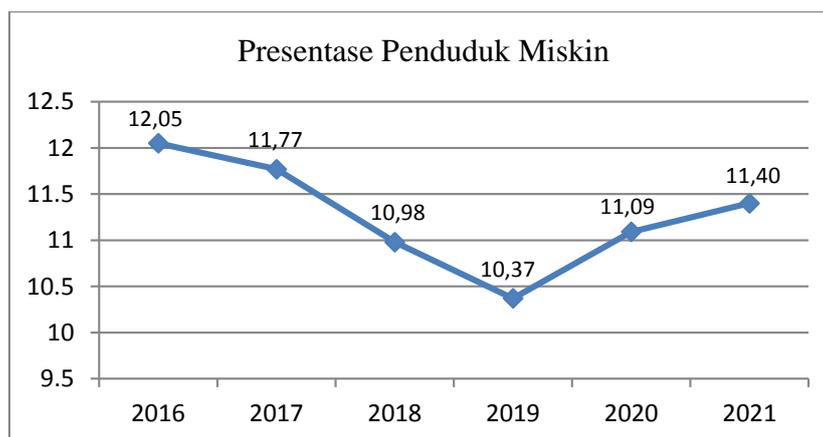
Provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi yang berada di ujung timur

⁶ Cokorda Istri Dian Purnama Yanthi dan A.A.I.N. Marhaeni, *Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah, Dan Pengangguran Terhadap Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*, Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. XI, No. 2, 2015, hlm. 69

⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 78

pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 4.775.970 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan di setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Jawa Timur mengalami penambahan sebesar 529.970 jiwa menjadi 4.585.970 jiwa dibandingkan dari tahun 2019 yang sebesar 4.056.000 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut masih berlanjut pada tahun 2021 hingga mencapai 4.572.730 jiwa.

Gambar 1.1
Grafik Kemiskinan Jawa Timur 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 Jawa Timur Dalam Angka 2022

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, dapat terlihat bahwa persentase kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Jawa Timur dalam rangka menanggulangi kemiskinan menunjukkan hasil yang cukup baik. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 4.703.300 jiwa mengalami penurunan sebesar 72.670 dari tahun sebelumnya yang sebesar 4.775.970.

Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 12,05 menurun 0,23 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 306.850 jiwa dan peningkatan presentase kemiskinan sebanyak 0,72% dari tahun sebelumnya.

Menurut BPS kemiskinan dapat diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah kebijakan upah minimum. Kebijakan penetapan upah minimum adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat agar mampu memenuhi standar hidup minimumnya. Upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah rendah.

Setiap wilayah di negara Indonesia mempunyai tingkat upah minimum yang berbeda-beda. Tahun ke tahun upah minimum regional (UMR) umumnya selalu mengalami kenaikan. Upah minimum dianggap mampu mengurangi tingkat kemiskinan apabila nilai upah minimum riil nya lebih besar dari tingkat inflasi yang berlaku saat itu. Selain itu produktivitas dari para pekerjanya juga harus tinggi sehingga daya beli riil masyarakat tidak mengalami penurunan.

Tabel 1.1
Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2021

Tahun	Upah Minimum	Persentase Kenaikan (Persen)
2015	Rp 1.000.000	-
2016	Rp 1.115.000	10,31
2017	Rp 1.388.000	19,66
2018	Rp 1.508.895	8,01
2019	Rp 1.630.059	7,43
2020	Rp 1.768.777	7,84
2021	Rp 1.868.777	5,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020

Dapat dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwa besaran upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2021 selalu mengalami kenaikan. Presentase kenaikan upah minimum terendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 5,35% yang mana pada tahun-tahun sebelumnya terjadi kenaikan diatas 7%.

Menurut Sungkar, upah minimum diyakini sebagai salah satu kebijakan yang efektif untuk menekan angka kemiskinan. Upah minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, karena akan meredistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah. Oleh karena itu, upah minimum dapat menciptakan distribusi upah yang adil sehingga memiliki kenaikan

pendapatan dan berdampak pada menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan.⁸

Salah satu faktor penting untuk dapat terlepas dari kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat dikatakan juga sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut Todaro dalam Safira menyatakan meskipun pertumbuhan ekonomi tidak memberi jawaban secara otomatis terhadap berbagai macam permasalahan ekonomi dan kesejahteraan, namun pertumbuhan ekonomi tetap menjadi unsur penting dalam pengentasan kemiskinan.⁹

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur tahun 2016 – 2021

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
2016	1 405 563	5,57
2017	1 482 300	5,46
2018	1 563 442	5,47
2019	1 649 896	5,53
2020	1 611 508	-2,33

⁸ Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, dan Muhammad Nasir, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3, No. 2, 2015

⁹ Safira, Sjamsu Djohan, Nurjanana, *Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur*, Forum Ekonomi, Vol. 21, No. 2, 2019

2021	1 669 117	3,57
------	-----------	------

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada tahun 2016 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,5%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis hingga laju pertumbuhan ekonomi sebesar -2,39%. Penurunan jumlah PDRB sebesar 39.348 menjadi 1.610.420 dari yang sebelumnya sebesar 1.649.768 pada tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki pengaruh dengan pendapatan yang diterima masyarakat. Kuznets mengemukakan mengenai Hipotesisi U terbalik, dimana pada tahap awal pembangunan ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Namun kondisi tersebut akan berlangsung sampai pada titik krisis tertentu, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh turunnya tingkat ketimpangan pendapatan, pada gilirannya juga akan menurunkan presentase penduduk miskin.¹⁰

Ketimpangan distribusi pendapatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Dimana adanya ketimpangan pendapatan menjadikan jurang pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin semakin

¹⁰ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 172

melebar. Daya beli masyarakat miskin melemah sehingga kemiskinan sulit diatasi.

Selain upah minimum dan pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam upaya pemakmuran sebuah negara dan pengentasan kemiskinan. Sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam tidak berarti secara otomatis menjamin kemakmuran masyarakatnya jika SDM yang ada tidak memiliki kemampuan (skill) dalam mengelola SDA tersebut. Begitu pula pada negara yang miskin sumber daya alam, jika memiliki SDM dengan kemampuan yang memadai, akan dapat berkembang lebih cepat daripada negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber Daya Manusia berperan ganda dalam pembangunan ekonomi, baik sebagai objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang menentukan kemajuan.¹¹

Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dilihat dari ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat tiga komponen utama dalam penetapan IPM, yaitu pendidikan yang dijabarkan dalam rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, kesehatan yang ditunjukkan dengan angka kematian bayi atau rata-rata harapan hidup, dan

¹¹ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 176

ketenagakerjaan yang mempengaruhi akses terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²

IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah.¹³

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2021

Tahun	IPM
2016	69,74
2017	70,27
2018	70,77
2019	71,50
2020	71,71
2021	72,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Dari data Tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan IPM Jawa Timur memperlihatkan perkembangan yang positif dari tahun ketahun. Pada tahun 2020, IPM Jawa Timur mencapai 72,14 meningkat 0,43 poin dibanding tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur termasuk kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sudah cukup baik. Tingginya IPM akan membawa dampak pada naiknya produktivitas kerja seseorang. Meningkatnya

¹² *Ibid.*, hlm. 173

¹³ Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 115-273

produktivitas kerja ini akan berpengaruh pada pendapatan yang meningkat sehingga mampu mengurangi kemiskinan masyarakat.

Selain pembangunan dalam kualitas sumber daya manusia, dalam mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks dan meliputi berbagai sector ini memerlukan kebijakan otonomi daerah dalam mengelola pengeluaran belanjanya. Pembelanjaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah sepantasnya mampu mengurangi masalah kesejahteraan yang masih membelit sebagian masyarakat yakni kemiskinan. Pos-pos belanja yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Sesuai dengan aturan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka pos-pos yang paling vital menyentuh langsung kesejahteraan rakyat salah satunya yaitu Belanja Modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan seperti aset daerah, infrastruktur, sarana dan prasarana dasar di daerah. Investasi pada sector barang modal ini sangat penting sebab dapat meningkatkan produksi dalam jangka panjang.¹⁴ Oleh karena itu, belanja modal harus disalurkan secara tepat sasaran dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Romi dan Etik tahun 2018 yang memberikan hasil bahwa upah minimum memberikan pengaruh positif signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran

signifikan terhadap kemiskinan.¹⁵ Selain itu, pada penelitian yang dilakukan Bambang Budhijana tahun 2019 menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negative terhadap kemiskinan.¹⁶ Bambang juga menyarankan terhadap penelitian selanjutnya untuk menambahkan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka dalam penelitian ini akan ditambahkan variabel belanja modal untuk melihat apakah variabel tersebut mampu mempengaruhi kemiskinan dalam jangka waktu panjang.

Berdasarkan uraian diatas, disini peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021"**.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadi peningkatan persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2021, dimana Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara provinsi lain di Pulau Jawa bahkan di Indonesia.
2. Kualitas SDM Jawa Timur yang ditunjukkan oleh IPM menunjukkan angka yang sudah cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan

¹⁵ Syahrur Romi dan Etik Umiyati, "Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi", *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Volume 7, No. 1, 2018, hlm. 6

¹⁶ R. Bambang Budhijana, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan*, Vol 5, No. 1, 2019

provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, Jawa Timur merupakan provinsi dengan IPM terendah.

3. Realisasi belanja modal daerah Kabupaten dan Kota masih banyak yang berada dibawah anggaran belanja.
4. Perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Upah minimum berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
5. Apakah upah minimum, IPM, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi, secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2021
5. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2021

E. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan akan mampu memberikan beberapa manfaat kepada lainnya, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis sebagai sumber informasi tambahan dan membantu perkembangan keilmuan khususnya

dalam bidang studi kajian ilmu ekonomi mengenai pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi pengambil kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat dijadikan sarana evaluasi dan memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.

b. Bagi pihak akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan atau referensi dibidang keilmuan ekonomi syariah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

c. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya guna menambahkan pengetahuan khususnya bagi pihak yang tertarik dengan masalah yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada 38 Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh upah minimum, IPM, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang terjadi di Kota/Kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2017-2021. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB Kemenkeu).

Terdapat banyak factor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin dalam suatu wilayah. Namun pada penelitian ini, penulis terbatas pada variabel upah minimum, IPM, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi, sebagai variabel bebas dan jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikat. Sampel dalam penelitian ini yaitu 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam sebuah penelitian diperlukan agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami skripsi ini. Penegasan istilah yang berkaitan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Upah minimum adalah jumlah minimum yang harus dibayarkan kepada sebagian besar pekerja disuatu negara, yang pada umumnya berdasarkan jam, harian, atau bulanan, dan yang ditetapkan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan

keluarganya, dengan mengingat kondisi ekonomi dan social nasional yang berlaku.¹⁷

- b. Indeks Pembangunan Manusia yaitu salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia sendiri yaitu suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya.
- c. Belanja modal yaitu pengeluaran atau anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.¹⁸ Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.
- d. Pertumbuhan ekonomi dapat di definisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah.¹⁹ Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan jangka panjang.

¹⁷ Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 54

¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 9

- e. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara nyata dan riil dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja modal pada kemiskinan yang terjadi di Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi sangatlah dibutuhkan dalam melakukan penelitian dengan tujuan guna memudahkan pembaca dalam memahami pola penelitian. Dari penelitian ini akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian awal, tersusun dari halaman sampul depan; halaman judul; halaman persetujuan; halaman pengesahan; motto; halaman persembahan; kata pengantar; daftar isi; daftar gambar; daftar tabel; daftar lampiran; dan abstrak.
2. Bagian utama, terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang hal-hal yang mendasari seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan paparan teori variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini akan didapati pula kajian penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka konseptual, mapping variabel, dan hipotesisi penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini tersusun dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variable penelitian, skala penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan hasil uji analisis data beserta gambaran umum penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini mengandung pemaparan yang menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada Bab 1 dan kemudian dianalisis dengan teori dan study yang ada sebelumnya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran atau rekomendasi

3. Bagian akhir, tersusun dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.